

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM  
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT (TAHUN 2006 – 2011)**

**ARTIKEL ILMIAH**



**OLEH**

**REZA MARIZKA**  
**BP/NIM : 2006/73394**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT**

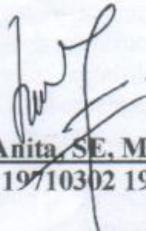
**REZA MARIZKA**  
2006 / 73394

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode September 2013 dan telah diperiksa dan disetujui oleh kedua pembimbing

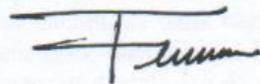
Padang, September 2013

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

  
**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19710302 199802 2 001

**Pembimbing II**

  
**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT (TAHUN 2006 – 2011)**

***Effect of Local Revenue, Shared Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on Financial Self-sufficiency Level of Local Governments in Districts and Cities at West Sumatera***

**Reza Marizka**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: [kojak.jackbygod@gmail.com](mailto:kojak.jackbygod@gmail.com)

***Abstract***

*The purpose of this research is aimed to examine 1) Influence of local revenue, to the Financial self-sufficiency of local governments 2) Effect of Shared Revenue to the Financial Self-sufficiency of local governments 3) Influence of General Allocation Fund to the Financial Self-sufficiency of local governments 4) Influence of Special Allocation Fund, to the level of Local Financial Independence on districts and cities in West Sumatera. The method of this research is qualitative research design. Budget realization report from each districts and cities in West Sumatera as population from the year 2006 to 2011. The sample set is determined by use total sampling technique, as 19 districts and cities in West Sumatera. The data utilizes is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Sumatera Province. Techniques of data analysis using multiple linear regression. The results showed that 1) Local Revenue impact positively significant on the level of Local Financial Independence 2) Shared Revenue did not significantly effect the level of local financial independence level, 3) the General Allocation Fund had no significant effect on the level of Local Financial Independence and 4) Special Allocation Fund impact negatively significant on the level of Local Financial Independence.*

*Key Word : Local Financial Independence Level, Local Revenue, Shared Revenue, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2) Pengaruh dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 3) Pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4) Pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. Populasi berupa laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Sumatera Barat dari tahun 2006-2011. Penetapan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling* yaitu sebanyak 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, 2) dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, 3) dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan 4) dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci :** Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah yang penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting dan harus memperhatikan keadilan politik dan keadilan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2007 : 232), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, selain

PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanto (2005) menunjukkan bahwa struktur penerimaan keuangan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan dari pusat. Kontribusi PAD dan DBH seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total penerimaan daerah masih rendah serta belum bisa mengoptimalkan pinjaman daerah (pinjaman jangka panjang) sehingga daerah tergantung pada pemerintah pusat dalam memperoleh dana pinjaman daerah.

Penelitian yang dilakukan Suprajitno (2003) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara masih kurang, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dari proporsi bantuan dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah yang relatif semakin besar, sebaliknya

kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah.

Penelitian yang dilakukan Muliana (2009) menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erysyad (2011) menemukan bahwa pada umumnya semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006-2008 masih jauh dikatakan mandiri dari segi finansialnya, rata-rata rasio kemandirian berkisar antara 3% sampai 10%. Hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktifitas daerahnya.

Pada tahun 2006 - 2011 rata-rata rasio pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat berada dibawah 10%, dan hanya Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi yang mempunyai rata-rata PAD di atas 10%, yaitu masing-masing sebesar 12,40%, 10,17% dan 10,22%. Sementara itu rata-rata rasio DBH di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih sangat rendah dimana kontribusinya terhadap pendapatan di bawah 10%. Rata-rata rasio DAU di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih tinggi yaitu di atas 50%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAU masih tinggi, sedangkan rata-rata rasio DAK kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih cukup rendah yaitu berkisar dibawah 12%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAK cukup rendah. Fenomena ini kemungkinan menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011)”**.

## 2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, 2) pengaruh dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, 3) pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat dan 4) pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

## 3. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: 1) bagi penulis, untuk lebih mengetahui tentang tingkat kemandirian keuangan daerah dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 (S-1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2) bagi akademis, sebagai bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi, khususnya Akuntansi Sektor Publik, 3) bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya khususnya tentang tingkat kemandirian keuangan daerah.

## B. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

### 1. Kajian Teori

#### a. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah}}$$

Pusat/Provinsi dan Pinjaman

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi

tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti DBH, DAU dan DAK maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

#### **b. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Yani (2002:51) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suhandi (2007:156) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut Halim (2007:96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

#### **c. Dana Bagi Hasil**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

#### **d. Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Saragih (2003 : 104) bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan

kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Yani, 2002 : 142). DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

#### e. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dimana daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

#### 2. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanto (2005) yang berjudul “Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003, menemukan bahwa struktur penerimaan keuangan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan (DAU dan DAK) dari pusat.

Penelitian yang dilakukan Suprajitno (2003) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal

Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara), menemukan bahwa tingkat ketergantungan fiskal antara Kabupaten Banjarnegara dengan pemerintah pusat cukup besar, yang ditandai dengan proporsi sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah yang lebih besar dari kontribusi PAD dan DBH, hal ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara masih rendah.

Penelitian yang dilakukan Muliana (2009) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara”. Dengan hasil penelitian bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Erysyad (2011) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”, menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### 3. Pengembangan Hipotesis

##### a. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Sidik dalam Wirawan (2007) seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi (*share*) PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya.

Hasil penelitian Erysyad (2011) dan Muliana (2009) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika PAD meningkat

maka kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika PAD rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Karena jika suatu daerah mempunyai PAD yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

#### **b. Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.**

Menurut Yani (2002:46) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Semakin besar persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin besar kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah, sebaliknya semakin kecil persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin kecil kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanto (2005) menunjukkan bahwa dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika suatu daerah mempunyai DBH yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

#### **c. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.**

Menurut Sidik (2004:96) distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai

kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Jadi dengan kata lain, jika pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar maka daerah tersebut kurang mandiri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tersebut kecil sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya.

#### **d. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.**

Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika DAK yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum mandiri dari segi fiskalnya.

Penelitian yang dilakukan Muliana (2009), menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti semakin besar DAK yang diterima oleh daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil DAK yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika DAK yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka

daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya.

#### 4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 1 pada lampiran.

#### 5. Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub>: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

H<sub>2</sub>: Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

H<sub>4</sub>: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat kausatif, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

#### 2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yakni seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah 19 kabupaten dan kota, berarti sampel yang

digunakan juga sebanyak 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) berdasarkan cara memperolehnya, jenis data ini adalah data sekunder, 2) berdasarkan waktu, data penelitian ini adalah data pooling yaitu gabungan antara data silang (*time series*) dengan data runtut waktu (*cross section*), 3) berdasarkan sifat, data yang digunakan adalah data kuantitatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara-cara yang digunakan dalam pengambilan data adalah: 1) dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait yaitu pada Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2) studi pustaka yang dilakukan di Universitas Negeri Padang, 3) tulisan dan penggunaan sistem komunikasi internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

#### 5. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Berikut ini adalah variabel-variabel penelitian yang digunakan serta pengukurannya

##### a. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur sebagai berikut :

$$TKKD = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

##### b. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

##### (1) Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>)

Pengukuran PAD dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### (2) Dana Bagi Hasil (X<sub>2</sub>)

Pengukuran DBH dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu :

$$\frac{\text{DBH}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### (3) Dana Alokasi Umum (X<sub>3</sub>)

Pengukuran DAU dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu :

$$\frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Total Pendapatan Daerah

**(4) Dana Alokasi Khusus (X<sub>4</sub>)**

Pengukuran DAK dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu :

$$\frac{\text{DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**D. Temuan Penelitian dan Pembahasan**

**1. Temuan Penelitian**

**a. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Wilayah Sumatera Barat terletak antara 0° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan. serta 98° dan 101° Bujur Timur. Daerah Sumatera Barat merupakan wilayah berbentuk daratan dan kepulauan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara pada bagian utaranya. di sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Riau. di sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Jambi. dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sumatera Barat memiliki luas wilayah sekitar 4.229.730 ha. setara dengan 2.17 % dari luas wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia. dengan luas perairan laut diperkirakan 186.500 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 2.420.57 km.

Sebelum tahun 1999 kabupaten dan kota di Sumatera Barat berjumlah 14, kemudian pada tahun 1999 Kepulauan Mentawai dimekarkan dari Padang Pariaman. Selanjutnya pada tahun 2002 Kota Pariaman dimekarkan dari Padang Pariaman. Terakhir pada tahun 2003 tiga daerah melakukan pemekaran yaitu Dharmasraya sebagai pemekaran dari Sawahlunto Sijunjung, Solok Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Dengan demikian kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat berjumlah 19 kabupaten dan kota.

**b. Deskripsi Variabel Penelitian**

**1) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat**

Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3 (lampiran). Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat rata-rata tingkat kemandirian

keuangan kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu sebesar 6,62%.

Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar 14,17%. Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rata-rata tingkat kemandirian keuangan paling rendah yaitu sebesar 2,92%. Rata-rata standar deviasi sebesar 3,15%. Rata-rata koefisien variasi sebesar 47,60%.

**2) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat**

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 4 (lampiran). Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu sebesar 6,12%.

Rata-rata pendapatan asli daerah tertinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar 12,40%. Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rata-rata pendapatan asli daerah paling rendah yaitu sebesar 2,84%. Rata-rata standar deviasi sebesar 2,71%. Rata-rata koefisien variasi sebesar 44,18%.

**3) Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat**

Untuk mengetahui perkembangan dana bagi hasil 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 5 (lampiran). Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat rata-rata dana bagi hasil kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu sebesar 5,36%.

Rata-rata dana bagi hasil tertinggi adalah Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 7,43%. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman mempunyai rata-rata dana bagi hasil paling rendah yaitu sebesar 3,45%. Rata-rata standar deviasi sebesar 1,19%. Rata-rata koefisien variasi sebesar 22,16%.

**4) Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat**

Untuk mengetahui perkembangan dana alokasi umum 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 6 (lampiran). Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat rata-rata dana alokasi umum kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu sebesar 70,59%.

Rata-rata dana alokasi umum tertinggi adalah Kabupaten Solok yaitu sebesar 75,42%. Sementara itu, Kabupaten Dharmasraya mempunyai rata-rata dana alokasi umum paling rendah yaitu sebesar 64,70%. Rata-rata standar deviasi sebesar 2,92%. Rata-rata koefisien variasi sebesar 4,13%.

#### 5) Dana Alokasi Khusus Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Untuk mengetahui perkembangan dana alokasi umum 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 7 (lampiran). Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat rata-rata dana alokasi khusus kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu sebesar 9,04%.

Rata-rata dana alokasi khusus tertinggi adalah Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 10,30%. Sementara itu, Kota Padang mempunyai rata-rata dana alokasi khusus paling rendah yaitu sebesar 4,29%. Rata-rata standar deviasi sebesar 1,57%. Rata-rata koefisien variasi sebesar 17,37%.

#### c. Analisis Induktif

##### 1) Uji Asumsi Klasik

##### a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil perhitungan nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk model yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 9 (lampiran).

Dari Tabel 9 tersebut terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai signifikan masing-masing variabel  $< 0,05$ . Artinya data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

##### b) Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value*  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$  maka dikatakan tidak

terdapat gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan nilai VIF untuk pengujian multikolinearitas antara sesama variabel bebas dapat dilihat pada Tabel 10 (lampiran).

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam tabel 10 menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

##### c) Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan nilai signifikan, apabila nilai  $\text{sig} > 0,05$  atau 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung masalah heterokedastisitas. Sebaliknya apabila nilai  $\text{sig} < 0,05$  atau 5% maka disimpulkan model regresi mengandung masalah heterokedastisitas. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 11 (lampiran).

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa level  $\text{sig} > \alpha 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala Heterokedastisitas dan layak digunakan dalam analisis regresi berganda.

##### d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil uji DW dapat dilihat pada tabel 12 (lampiran). Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin – Watson adalah 1,974. Nilai  $dl$  dengan  $k=4$  dan  $n=114$  adalah 1,6227 sehingga klasifikasi nilai DW berada pada interval 5 yaitu  $1,7677 < 1,974 < 2,232$ . Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi.

#### d. Model dan Teknik Analisis Data

##### 1) Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*), hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 13 (lampiran). Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh persamaan tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) sebagai berikut :

$$\text{LnY} = -0.009 + 1.062 \text{LnX}_1 + 0.001 \text{LnX}_2 - 0.004 \text{LnX}_3 - 0.004 \text{LnX}_4$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Bagi Hasil

X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Umum

X<sub>4</sub> = Dana Alokasi Khusus

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -0.009. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen yaitu PAD, DBH, DAU dan DAK tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah berkurang sebesar -0.009.

Hasil Estimasi Model Regresi Berganda Coefficients<sup>a</sup>

Model	B	t	Sig
1(Constant)	-.009	-.607	.545
lnx1	1.062	533.120	.000
lnx2	.001	.423	.673
lnx3	-.004	-.503	.616
lnx4	-.004	-2.052	.043

PAD (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif dan signifikan yaitu sebesar 1.062 dan  $0.000 \leq \alpha = 0.05$ .

DBH (X<sub>2</sub>) berpengaruh positif dan tidak signifikan yaitu sebesar 0.001 dan  $0.67 \geq \alpha = 0.05$ .

DAU (X<sub>3</sub>) berpengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar -0.004 dan  $0.0616 \geq \alpha = 0.05$ .

DAK (X<sub>4</sub>) berpengaruh negatif dan signifikan sebesar -0.004 dan  $0.043 \leq \alpha = 0.05$ .

##### 1) Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil pengukuran koefisien determinasi memperlihatkan nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,994. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 99,40%

sedangkan 0,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adjusted R Square Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994 <sup>a</sup>	.994	.994	.00582

##### 2) Uji F (F-Test)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Jika nilai sig yang diperoleh < derajat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya jika nilai sig yang diperoleh  $\geq$  derajat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hasil Uji F Statistik ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.052	4	2.763	81473.302	.000 <sup>a</sup>
Residual	.004	106	.000		
Total	11.056	110			

Nilai sig 0.000 < 0.05. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat serta persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

##### e. Uji Hipotesis

Hipotesis 1: pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil olahan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel X<sub>1</sub> bernilai positif yaitu sebesar 1.062. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian bahwa H<sub>1</sub> dapat diterima, dimana semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hipotesis 2: dana bagi hasil berpengaruh signifikan Positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil olahan data menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar

$0.673 > 0.05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_2$  bernilai positif yaitu sebesar 0.001. Jadi hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga  $H_2$  ditolak.

Hipotesis 3: dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil olahan data menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0.616 > 0.05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_3$  bernilai negatif yaitu sebesar -0.004. Jadi hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga  $H_3$  ditolak.

Hipotesis 4: Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil olahan data menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0.043 < 0.05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_4$  bernilai negatif yaitu sebesar -0.004. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian bahwa  $H_4$  dapat diterima, dimana semakin tinggi dana alokasi khusus maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah.

## 2. Pembahasan

### a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti DBH, DAU dan DAK maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lain karena PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali

dalam wilayah daerah yang bersangkutan sehingga optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

### b. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

Namun dana yang berasal dari pemungutan pajak dan bukan pajak yang diserahkan oleh pusat kepada setiap daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat terus mengalami penurunan setiap tahunnya, selain itu penerimaan dari sumber daya alam setiap daerah tidak sama, ada daerah dengan sumber daya alam tidak besar dan ada daerah dengan sumber daya alam yang cukup besar, sehingga masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Demikian halnya dalam sistem dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, peranan pajak dalam penerimaan pendapatan daerah masih sangat rendah karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat.

Dalam hal penyaluran DBH permasalahan yang sering muncul adalah adanya praktek pembagian triwulanan yang tidak tepat waktu merupakan keluhan bagi daerah penerima DBH,

ketika sudah dibayarkan masih muncul permasalahan yaitu kelebihan atau kekurangan pembayaran untuk suatu daerah. Hal ini terjadi karena penetapan alokasi sementara yang berdasarkan prognosa penerimaan pajak lebih tinggi atau lebih rendah dari alokasi defenitif yang berdasarkan realisasi penerimaan pajak sesungguhnya. Demikian juga dengan proses penyaluran DBH yang bersumber dari sumber daya alam, adanya keterlambatan atas penyaluran dalam setiap triwulannya mengganggu sistem perencanaan pembangunan di daerah.

#### **c. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat**

Hasil penelitian menunjukan bahwa dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat. Kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap*, yaitu ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Penggunaan dana alokasi umum yang dialokasikan oleh pemerintah pusat belum digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh daerah berarti penggunaan dana tersebut belum mencapai target atau tujuan kepentingan publik serta penggunaannya belum untuk menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. Hal ini terlihat dengan masih rendahnya pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera barat yaitu sebesar 6,12%, sementara itu rata-rata dana alokasi umum tinggi yaitu sebesar 70,59%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah belum dimanfaatkan untuk sektor-sektor produktif yang dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pendapatan asli daerah, serta lebih digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan spekulatif, oleh sebab itu dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi.

Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup. Dana alokasi khusus disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Perhitungan alokasi dana alokasi khusus dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus dan penentuan besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah.

### **E. Penutup**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- b. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- c. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Seperti kebanyakan penelitian yang lainnya, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

- a. Pemilihan variabel yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah terdiri dari empat variabel saja yaitu PAD, DBH, DAU dan DAK. Sementara masih banyak variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah seperti pinjaman daerah, lain-lain pendapatan yang dipisahkan dan investasi.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang ada di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat sehingga belum bisa generalisasi.
- c. Rentang waktu penelitian hanya dilakukan selama 6 tahun yaitu dari 2006-2011, sehingga belum bisa digeneralisasi.
- d. Penulis belum bisa menjelaskan dan memberikan bukti yang cukup jelas dan akurat terhadap penyebab hasil penelitian yang tidak sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian.

## 3. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pada umumnya semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat masih jauh dikatakan mandiri dari segi finansialnya, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah yaitu sebesar 6,62%. Hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktifitas daerahnya. Seharusnya pemerintah daerah tidak hanya megandalkan dana transfer dari pemerintah pusat saja, hendaknya pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien serta bertahap mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.
- b. Bagi penelitian selanjutnya
  - 1) Memperpanjang periode pengamatan pengambilan sampel agar data lebih akurat.

- 2) Menambah sampel daerah kabupaten dan kota. Misalnya sampel ambil adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera sehingga hasilnya lebih bagus dan akurat.
- 3) Menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah seperti pinjaman daerah, otonomi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, investasi dan lain-lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2006-2011*. BPS Sumatera Barat : Padang.
- Ersyad, Muhammad. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)*. Skripsi. FE UNP : Padang.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 Edisi 6*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Salemba Empat : Jakarta.
- . 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke tiga*. Salemba Empat : Jakarta.
- Kuncoro, Mudjarad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga : Jakarta.
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara, Skripsi USU : Medan*.
- Noviyanto, Haris. 2005. *Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003*. Skripsi. FE Universitas Islam Indonesia.

- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- , 2004. *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonomi*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Andalas Lima Sisi : Padang.
- Suprajitno, Pudji. 2003. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro : Semarang.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

## LAMPIRAN

**Tabel 3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Kabupaten dan Kota	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)						Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kabupaten Mentawai	6.68	6.69	7.53	8.29	7.56	9.19	7.66
Kabupaten Pesisir Selatan	2.91	2.45	2.60	3.12	2.46	3.98	2.92
Kabupaten Solok	4.22	5.23	3.95	4.22	3.68	4.48	4.30
Kabupaten Sijunjung	5.59	6.25	6.92	6.70	5.27	7.97	6.45
Kabupaten Tanah Datar	7.41	7.06	6.74	7.27	7.03	8.29	7.30
Kabupaten Padang Pariaman	3.19	3.05	4.07	4.10	3.86	3.68	3.66
Kabupaten Agam	4.26	5.02	4.61	4.84	3.86	5.40	4.67
Kabupaten Lima Puluh Kota	4.41	4.02	4.24	2.17	3.10	3.59	3.59
Kabupaten Pasaman	3.68	4.75	4.22	3.79	3.79	4.65	4.15
Kabupaten Solok Selatan	3.23	4.03	4.06	3.77	2.20	3.55	3.47
Kabupaten Dharmasraya	4.90	5.70	6.05	6.57	10.79	7.32	6.89
Kabupaten Pasaman Barat	4.72	5.47	4.88	5.50	5.35	5.06	5.16
Kota Padang	16.20	15.09	14.70	13.43	12.64	12.97	14.17
Kota Solok	8.79	7.70	8.11	8.48	7.01	7.19	7.88
Kota Sawah Lunto	8.59	9.56	9.49	9.95	8.21	10.28	9.35
Kota Padang Panjang	5.16	5.09	5.48	8.68	9.77	9.63	7.30
Kota Bukittinggi	10.94	10.03	11.57	12.92	11.11	11.77	11.39
Kota Payakumbuh	10.95	10.73	10.98	10.67	12.10	12.49	11.32
Kota Pariaman	3.40	3.45	4.60	4.08	4.49	4.41	4.07
<b>MEAN</b>	<b>6.28</b>	<b>6.39</b>	<b>6.57</b>	<b>6.77</b>	<b>6.54</b>	<b>7.15</b>	<b>6.62</b>
<b>Standar Deviasi</b>	<b>3,48</b>	<b>3,12</b>	<b>3,17</b>	<b>3,29</b>	<b>3,39</b>	<b>3,18</b>	<b>3.15</b>
<b>Koevisien Variasi</b>	<b>55,48</b>	<b>48,89</b>	<b>48,23</b>	<b>48,68</b>	<b>51,78</b>	<b>44,44</b>	<b>47.60</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah 2013)*

**Tabel 4. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah**

Kabupaten dan Kota	Rasio Pendapatan Asli Daerah (%)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata
Kabupaten Mentawai	6.26	6.27	7.00	7.65	7.03	8.41	7.10
Kabupaten Pesisir Selatan	2.82	2.4	2.53	3.02	2.41	3.83	2.84
Kabupaten Solok	4.05	4.97	3.8	4.05	3.55	4.29	4.12
Kabupaten Sijunjung	5.3	5.88	6.47	6.28	5.00	7.38	6.05
Kabupaten Tanah Datar	6.9	6.6	6.32	6.78	6.57	7.65	6.80
Kabupaten Padang Pariaman	3.09	2.96	3.91	3.94	3.72	3.55	3.53
Kabupaten Agam	4.09	4.78	4.41	4.62	3.72	5.12	4.46
Kabupaten Lima Puluh Kota	4.23	3.86	4.07	2.12	3.00	3.47	3.46
Kabupaten Pasaman	3.55	4.54	4.05	3.65	3.65	4.44	3.98
Kabupaten Solok Selatan	3.13	3.88	3.9	3.64	2.15	3.43	3.36
Kabupaten Dharmasraya	4.67	5.4	5.7	6.16	9.74	6.82	6.42
Kabupaten Pasaman Barat	4.5	5.18	4.66	5.21	5.08	4.82	4.91
Kota Padang	13.94	13.11	12.81	11.84	11.22	11.48	12.40
Kota Solok	8.08	7.15	7.5	7.82	6.55	6.71	7.30
Kota Sawah Lunto	7.91	8.73	8.67	9.05	7.59	9.32	8.55
Kota Padang Panjang	4.91	4.85	5.19	7.99	8.9	8.78	6.77
Kota Bukittinggi	9.86	9.12	10.37	11.44	10.00	10.53	10.22
Kota Payakumbuh	9.87	9.69	9.89	9.64	10.79	11.11	10.17
Kota Pariaman	3.28	3.34	4.4	3.92	4.29	4.23	3.91
<b>MEAN</b>	<b>5.81</b>	<b>5.93</b>	<b>6.09</b>	<b>6.25</b>	<b>6.05</b>	<b>6.60</b>	<b>6.12</b>
<b>Standar Deviasi</b>	<b>2.96</b>	<b>2.67</b>	<b>2.71</b>	<b>2.84</b>	<b>2.95</b>	<b>2.73</b>	<b>2.71</b>
<b>Koefisien Variasi</b>	<b>50.91</b>	<b>45.03</b>	<b>44.49</b>	<b>45.49</b>	<b>48.68</b>	<b>41.44</b>	<b>44.18</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah 2013)

**Tabel 5. Rasio Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah**

Kabupaten dan Kota	Rasio Dana Bagi Hasil (%)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata
Kabupaten Mentawai	8.58	9.42	8.68	6.63	8.59	0.87	7.13
Kabupaten Pesisir Selatan	5.44	5.11	3.88	4.85	4.02	3.54	4.47
Kabupaten Solok	5.01	4.14	4.64	4.68	4.82	3.43	4.45
Kabupaten Sijunjung	5.23	5.32	4.91	4.7	5.48	4.41	5.01
Kabupaten Tanah Datar	4.08	4.28	3.85	3.67	4.02	2.83	3.79
Kabupaten Padang Pariaman	4.19	3.54	3.31	3.51	3.17	2.98	3.45
Kabupaten Agam	4.57	4.59	4.04	3.79	3.92	0.00	3.49
Kabupaten Lima Puluh Kota	5.05	4.94	4.43	3.98	4.68	3.9	4.50
Kabupaten Pasaman	5.32	6.09	5.29	5.37	5.7	4.09	5.31
Kabupaten Solok Selatan	4.01	8.25	7.64	7.26	7.97	9.42	7.43
Kabupaten Dharmasraya	6.19	5.68	7.13	5.45	5.78	5.5	5.96
Kabupaten Pasaman Barat	6.55	6.23	6.25	6.03	5.89	4.36	5.89
Kota Padang	5.67	7.01	6.41	6.15	6.29	5.16	6.12
Kota Solok	6.17	6.33	5.98	5.78	6.67	4.45	5.90
Kota Sawah Lunto	9.15	7.61	5.63	8.23	5.89	5.82	7.06
Kota Padang Panjang	7.31	7.48	6.64	6.08	6.34	5.18	6.51
Kota Bukittinggi	5.28	5.16	5.34	5.58	5.61	3.89	5.14
Kota Payakumbuh	5.49	5.07	5.14	4.99	5.52	4.11	5.05
Kota Pariaman	6.7	7.06	5.35	6.13	0.61	5.35	5.20
<b>MEAN</b>	<b>5,79</b>	<b>5,96</b>	<b>5,50</b>	<b>5,41</b>	<b>5,31</b>	<b>4,17</b>	<b>5,36</b>
<b>Standar Deviasi</b>	<b>1,40</b>	<b>1,53</b>	<b>1,39</b>	<b>1,24</b>	<b>1,76</b>	<b>1,95</b>	<b>1,19</b>
<b>Koevisien Variasi</b>	<b>24,23</b>	<b>25,72</b>	<b>25,35</b>	<b>22,94</b>	<b>33,04</b>	<b>46,65</b>	<b>22,16</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah 2013)

**Tabel 6. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah**

Kabupaten dan Kota	Rasio Dana Alokasi Umum (%)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata
Kabupaten Mentawai	73.09	74.47	67.93	72.55	72.15	74.23	72.40
Kabupaten Pesisir Selatan	80.09	75.09	65.6	77.43	62.07	64.95	70.87
Kabupaten Solok	78.67	74.83	75.61	75.35	75.07	72.99	75.42
Kabupaten Sijunjung	71.5	67.71	72.58	67.51	66.29	60.72	67.72
Kabupaten Tanah Datar	75.41	74.12	74.1	70.48	69.41	64.19	71.29
Kabupaten Padang Pariaman	82.24	63.09	66.86	71.86	62.88	61.87	68.13
Kabupaten Agam	80.08	72.43	75.66	74.55	70.61	66.2	73.26
Kabupaten Lima Puluh Kota	78.55	75.27	75.48	73.78	70.91	67.29	73.55
Kabupaten Pasaman	68.84	73.59	74.1	74.05	73.38	62.36	71.05
Kabupaten Solok Selatan	80.23	70.02	69.25	67.17	71.69	61.23	69.93
Kabupaten Dharmasraya	74.54	68.12	65.05	62.82	58.84	58.85	64.70
Kabupaten Pasaman Barat	76.64	71.7	72.04	71.8	73.47	73.66	73.22
Kota Padang	71.29	69.57	67.98	65.65	60.78	57.98	65.54
Kota Solok	74.68	69.81	71.34	67.55	74.11	67.16	70.78
Kota Sawah Lunto	71.43	68.95	69.39	64.92	64.48	57.71	66.15
Kota Padang Panjang	80.00	75.4	74.36	68.91	69.69	69.12	72.91
Kota Bukittinggi	74.01	71.66	72.47	69.46	71.6	67.97	71.20
Kota Payakumbuh	77.23	73.81	73.73	70.33	72.69	64.84	72.11
Kota Pariaman	76.5	71.35	73.57	71.08	68.27	65.19	70.99
<b>MEAN</b>	<b>76,05</b>	<b>71,63</b>	<b>71,43</b>	<b>70,38</b>	<b>68,86</b>	<b>65,18</b>	<b>70,59</b>
<b>Standar Deviasi</b>	<b>3,75</b>	<b>3,26</b>	<b>3,46</b>	<b>3,84</b>	<b>4,89</b>	<b>5,00</b>	<b>2,92</b>
<b>Koevisien Variasi</b>	<b>4,93</b>	<b>4,55</b>	<b>4,85</b>	<b>5,45</b>	<b>7,10</b>	<b>7,68</b>	<b>4,13</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah 2013)

**Tabel 7. Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah**

Kabupaten dan Kota	Rasio Dana Alokasi Khusus (%)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata
Kabupaten Mentawai	8.62	6.8	3.47	9.76	5.99	8.14	7.13
Kabupaten Pesisir Selatan	7.88	10.61	10.94	10.23	8.34	9.79	9.63
Kabupaten Solok	8.54	10.93	11.44	9.73	9.12	7.89	9.61
Kabupaten Sijunjung	8.75	9.91	10.95	9.64	7.28	7.71	9.04
Kabupaten Tanah Datar	10.15	9.9	10.3	11.2	8.28	7.1	9.49
Kabupaten Padang Pariaman	7.45	9.48	10.26	10.19	7.86	8.88	9.02
Kabupaten Agam	7.06	10.85	11.34	9.72	8.94	6.61	9.09
Kabupaten Lima Puluh Kota	7.41	10.74	11.76	13.52	8.44	6.73	9.77
Kabupaten Pasaman	11.82	10.58	12.2	10.47	8.24	6.98	10.05
Kabupaten Solok Selatan	9.8	12.68	13.95	16.5	8.33	6.55	11.30
Kabupaten Dharmasraya	9.27	11.72	10.7	9.97	8.29	7.46	9.57
Kabupaten Pasaman Barat	8.4	10.91	11.01	11.19	10.51	7.39	9.90
Kota Padang	3.69	3.98	4.77	4.75	4.18	4.35	4.29
Kota Solok	8.15	10.2	11.38	12.43	4.86	4.11	8.52
Kota Sawah Lunto	8.88	11.63	12.29	14.07	6.09	6.69	9.94
Kota Padang Panjang	4.8	10.11	11.34	13.51	12.32	9.92	10.33
Kota Bukittinggi	7.00	9.33	9.15	10.92	5.37	4.36	7.69
Kota Payakumbuh	7.47	7.25	8.41	10.8	3.48	5.28	7.12
Kota Pariaman	10.63	12.01	13.19	14.29	5.56	5.45	10.19
<b>MEAN</b>	<b>8,20</b>	<b>9,98</b>	<b>10,47</b>	<b>11,20</b>	<b>7,45</b>	<b>6,92</b>	<b>9,04</b>
<b>Standar Deviasi</b>	<b>1,89</b>	<b>2,05</b>	<b>2,57</b>	<b>2,50</b>	<b>2,21</b>	<b>1,68</b>	<b>1,57</b>
<b>Koevisien Variasi</b>	<b>23,01</b>	<b>20,50</b>	<b>24,58</b>	<b>22,34</b>	<b>29,68</b>	<b>24,32</b>	<b>17,37</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah 2013)

**Tabel 9. Hasil Uji Normalitas dengan Transformasi Data  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	tkk	pad	dbh	dau	dak
Kolmogorov-Smirnov Z	1.279	1.215	.774	.950	.802
Asymp. Sig. (2-tailed)	.076	.104	.587	.328	.541

Sumber : hasil olahan SPSS 17.0 (2013)

**Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Inx1	.874	1.144
Inx2	.973	1.028
Inx3	.897	1.114
Inx4	.948	1.055

Sumber : hasil olahan SPSS 17.0 (2013)

**Tabel 11. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients(a)**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	.000	1.000
Inx1	.000	1.000
Inx2	.000	1.000
Inx3	.000	1.000
Inx4	.000	1.000

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber : hasil olahan SPSS 17.0 (2013)

**Tabel 12. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Model Summary b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.994 <sup>a</sup>	.994	.994	.00582	1.974

a. Predictors: (Constant), Inx4, Inx2, Inx3, Inx1

b. Dependent Variable: Iny

Sumber : hasil olahan SPSS 17.0 (2013)

**Tabel 13. Hasil Estimasi Model Regresi Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.009	.015		-.607	.545
lnx1	1.062	.002	.999	533.120	.000
lnx2	.001	.001	.001	.423	.673
lnx3	-.004	.007	.000	-.503	.616
lnx4	-.004	.002	-.004	-2.052	.043

a. Dependent Variable: lny

Sumber : hasil olahan SPSS 17.0 (2013)